



PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN

MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025 - 2045 KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

SAROLANGUN, 11 JULI 2024



Dr. Ir. BACHRIL BAKRI, M.App.Sc.
Pj. Bupati Sarolangun





Latar Belakang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa **Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah** dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah.



Salah satu bentuk dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). **RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah selama 20 tahun** kedepan dan berisi substansi yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Dokumen RPJPD sebagai instrumen pembangunan daerah perlu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan seluruh pemanku kepentingan dengan memperhatikan dinamika perubahan melalui **pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).**



Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 ini disusun sebagai bagian penting yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan yang juga selaras dengan **dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045.**



Dasar Hukum



UU No. 25 Tahun 2004

Tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional;



UU No. 23 Tahun 2014

Tentang
Pemerintahan
Daerah;



PP No. 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan,
Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah;



Permendagri 86 Tahun 2017

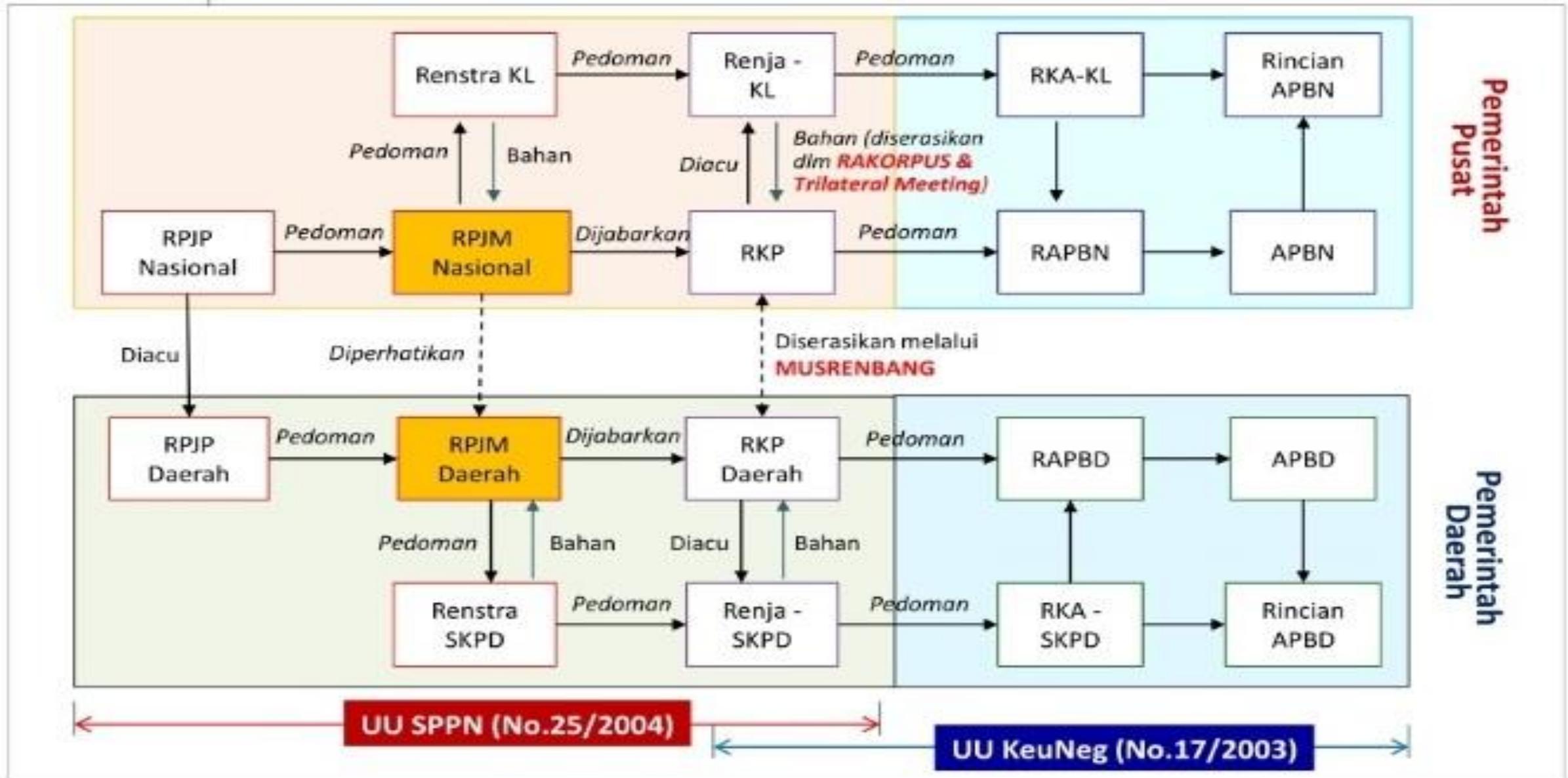
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah
Tahun 2025-2045

Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah



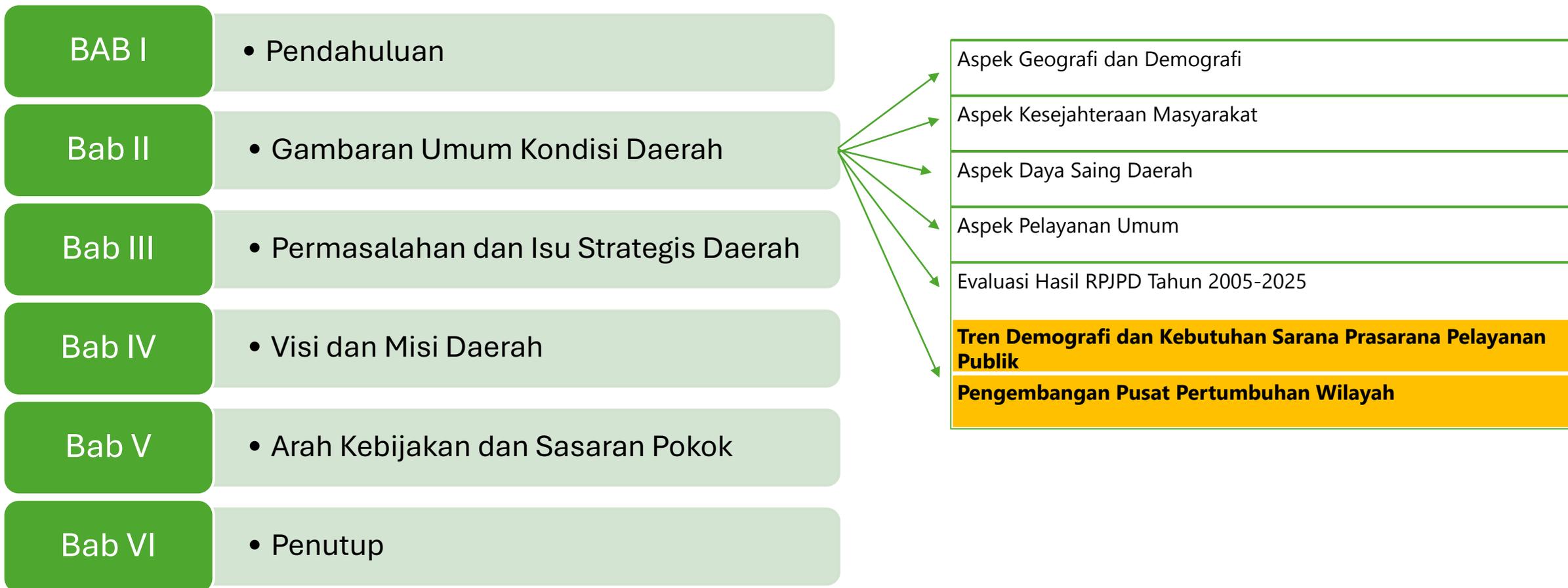


Tahapan Penyusunan RPJPD 2025-2045

Tahapan	Aktivitas	2023			2024								Ket	
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt		
Penyusunan Substansi RPJPD Kab/Kota	Penyusunan Rancangan Awal	■	■	■										PL Des M4
	Konsultasi Publik				■									PL Jan M2
	Penyampaian Ranwal ke DPRD (Nota Kesepakatan)				■									PL Jan M3
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur				■									PL Jan M4
	Penyusunan Rancangan						Pemilu	■						
	Musrenbang							■						PL Apr M1
	Penyusunan Rancangan Akhir								■					PL Mei M4
	Reviu APIP									■				PL Jun M2
Proses Penetapan RPJPD Kab/Kota	Pembahasan dengan DPRD											■	■	PL Agus M1
	Persetujuan Bersama												■	PL Agus M1
	Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045												■	PL Agus M3
	Penetapan Perda RPJPD												■	PL Agus M4

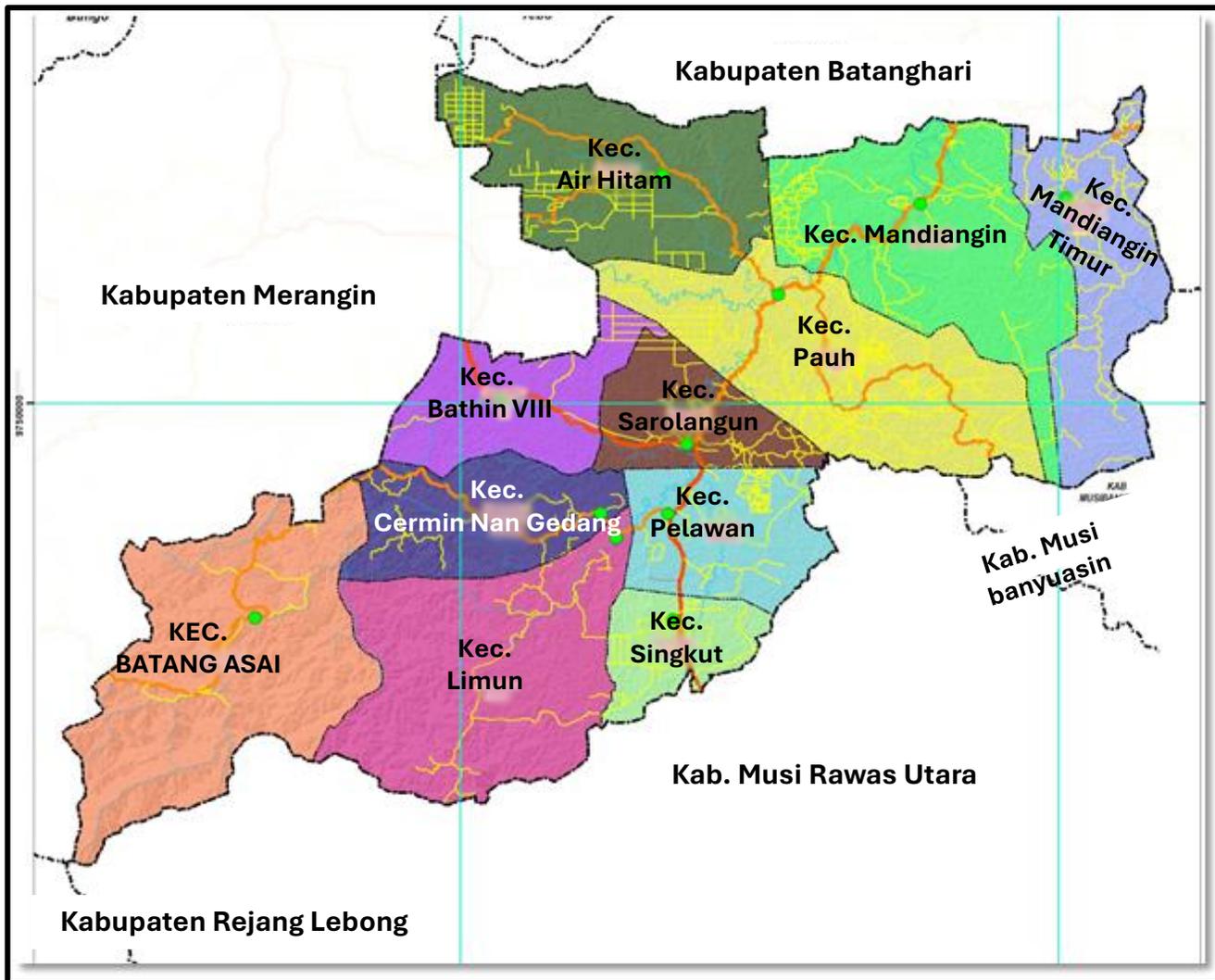


Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045





PENDAHULUAN



Dasar Pembentukan : UU Nomor 54 Tahun 1999

Luas Wilayah : 5.941,13 KM2

Jumlah Kec. : 11 Kecamatan

Jumlah Desa : 149 Desa

Jumlah Kelurahan : 9 Kelurahan

Ketinggian wilayah : 20 – 1.950 Meter/dpl

Kemiringan wilayah : Dataran dan Bergelombang

Jumlah Penduduk : 302.499 Jiwa (Disdukcapil, 2023)

Batas Wilayah
 Utara : Kab. Batanghari
 Timur : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas utara
 Selatan : Kabupaten Rejang Lebong
 Barat : Kab. Merangin

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1	Sarolangun	281.07	4.73
2	Bathin VIII	360.84	6.07
3	Pelawan	347.44	5.85
4	Singkut	209.78	3.53
5	Cermin Nan Gedang	385.46	6.49
6	Limun	807.11	13.59
7	Batang Asai	926.79	15.60
8	Pauh	759.40	12.78
9	Air Hitam	634.84	10.69
10	Mandiangin	748.74	12.60
11	Mandiangin Timur	479.66	8.07
Jumlah Luas		5.941,13	100,00



Isu Strategis RPJPD Kabupaten Sarolangun 2025-2045



**Peningkatan Kualitas
dan daya saing
sumber daya
manusia**



**Keberlanjutan sumber daya
alam dan lingkungan hidup,
serta penanggulangan
bencana**



**Perekonomian daerah
yang berkualitas, handal
dan mandiri**



**Penyediaan Infrastruktur yang
berkualitas dan memadai
untuk pertumbuhan dan
konektivitas**



**Tata kelola pemerintahan dan
Pelayanan Publik**



Penyandingan Kalimat Visi

INDONESIA



Visi Indonesia Emas 2045:
Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

PROVINSI JAMBI



Jambi Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan

KABUPATEN SAROLANGUN



Sarolangun Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

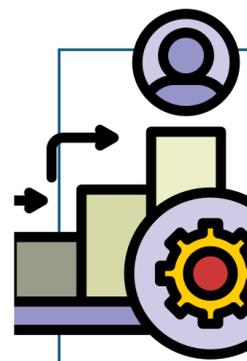


Penjelasan Kata Kunci Visi RPJPD



Maju

Peningkatan perekonomian Masyarakat dengan Pendapatan per kapita penduduk yang tinggi, Tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik, Penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa.



Berdaya saing

Kemampuan daerah menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing secara domestik, regional dan internasional



Sejahtera

Masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang rendah, tidak ada stunting, menikmati Pendidikan dan Kesehatan yang baik dan berkualitas, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan berkurangnya tingkat kriminalitas.



Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi Lestari.



Sasaran Visi

PENYELARASAN RUMUSAN SASARAN VISI RPJPN DAN RPJPD KABUPATEN SAROLANGUN

No	RPJPN				RPJPD PROV JAMBI				RPJPD KAB SAROLANGUN						
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*	Target 2045**	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 **	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 **			
1	Peningkatan pendapatan per kapita	GNI per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	88,95 - 89,03	555,68 - 652,01	Peningkatan pendapatan per kapita (Maju)	PDRB per kapita (Rp Juta)	73,500 - 73,580	540,230 - 636,560			
		Kontribusi PDB maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru	18,01	163,31							
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	9,86 - 9,91	13,22 - 13,31					Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	4,05 - 4,10	7,41 - 7,50
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kmiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,28 - 5,78	0,07 - 0,32	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan Pendapatan (sejahtera)	Tingkat Kemiskinan (%)	7,98 - 8,03	0,268 - 0,289			
		Rasio gini	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio Gini (indeks)	0,337 - 0,341	0,275 - 0,326					Rasio Gini (indeks)	0,290 - 0,294	0,273 - 0,288
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,44	1,70					Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	7,36	7,71
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34	15 besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	0	0	Peningkatan Daya Saing Daerah (berdaya saing)	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,02	3,27			
4	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,71	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia (maju)	Indek Modal Manusia (indeks)	0,54	0,69			
5	Penurunan emisi GKR menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	78,5	97,88	Peningkatan Kualitas Lingkungan (berkelanjutan)	Indeks Kualitas Lingkungan (indeks)	75,23	79,47			



Misi RPJPD Kabupaten Sarolangun

Sarolangun Maju, Sejahtera,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Diwujudkan Melalui:

Misi 1

Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;

Misi 2

Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemerataan ekonomi yang berkeadilan;

Misi 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima.

Misi 4

Mewujudkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kemajemukan;

Misi 5

Mewujudkan Lingkungan Hidup lestari dan berkelanjutan;

Misi 6

Mewujudkan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan;



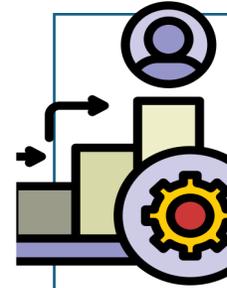


Penyandingan Visi & Misi



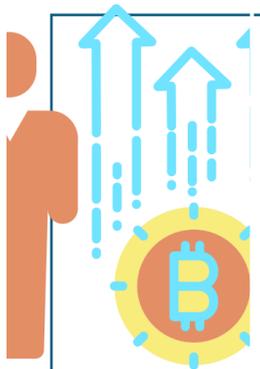
Maju

akan dicapai melalui pelaksanaan **Misi 1 dan 2**, serta memiliki landasan dan **didukung oleh Misi 3,4, 6**.



Berdaya saing

akan dicapai melalui pelaksanaan **Misi 1 dan 2**, serta memiliki landasan dan **didukung oleh Misi 3,4 dan 6**.



Sejahtera

akan dicapai melalui **pelaksanaan Misi 1 dan 2**, serta memiliki landasan dan **didukung oleh Misi 3, dan 4**.



Berkelanjutan

yang mengadopsi pilar pembangunan berkelanjutan berupa sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, dengan demikian akan **dicapai melalui pelaksanaan misi 5 dan didukung oleh seluruh misi**.



Penyandingan Misi

No.	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045	RPJPD Kabupaten Sarolangun 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	Misi 1: Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;
2		Transformasi ekonomi	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemertaan ekonomi yang berkeadilan;
3		Transformasi tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima;
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 4: Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4: Mewujudkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kemajemukan;
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup lestari dan berkelanjutan;
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Misi 6: Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6: Mewujudkan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan;
		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Daerah	
		Kesinambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	

Arah Kebijakan Sebagai Tema Makro

RPJPN

Periode 1
(2025 – 2029)

**Perkuatan Fondasi
Transformasi**

Periode 2
(2030-2034)

Akselerasi Transformasi

Periode 3
(2035 – 2039)

Ekspansi Global

Periode 4
(2040 – 2045)

Perwujudan Indonesia Emas

RPJPD PROVINSI JAMBI

Periode 1
(2025 – 2029)

**Penguatan Fondasi
Transformasi Daerah**

Periode 2
(2030-2034)

**Akselerasi Perwujudan
Transformasi**

Periode 3
(2035 – 2039)

**Ekspansi Global dan
Nasional**

Periode 4
(2040 – 2045)

**Perwujudan Jambi yang maju
Sejahtera dan Berkelanjutan**

RPJPD KABUPATEN SAROLANGUN

Periode 1
(2025 – 2029)

**Membangun fondasi dan
struktur transformasi
pembangunan**

Periode 2
(2030-2034)

**Memperkuat fondasi dan
struktur transformasi
pembangunan**

Periode 3
(2035 – 2039)

Ekspansi Nasional dan Daerah

Periode 4
(2040 – 2045)

**Perwujudan Sarolangun Maju, Sejahtera,
Berdaya saing dan Berkelanjutan**



ARAH KEBIJAKAN

No	Misi	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Memperkuat Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Ekspansi Nasional dan Daerah	Perwujudan Sarolangun Maju, Sejahtera, Berdayasaing dan Berkelanjutan
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing;	Peningkatan Kualitas Manusia, Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Derajat Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Inklusif	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan Sosial	Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdayasaing
2	Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemertaan ekonomi yang berkeadilan;	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Fondasi Kemajuan Perekonomian Daerah	Percepatan Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kemajuan Perekonomiati Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Lokal
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Tinggi dan Pelayanan Publik Prima	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdaya Saing Tinggi
4	Mewujudkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kemajemukan;	Peningkatan Kualitas Masyarakat Madani dan Penguatan Kohesivitas Sosial	Pemantapan Kualitas Masyarakat Madani dan Kohesivitas Sosial	Masyarakat Madani Berkualitas dan Kohesivitas Sosial Kuat	Masyarakat Mariani Berkualitas dan Kohesivitas Sosial Kuat Secara Berkelanjutan
5	Mewujudkan Lingkungan Hidup lestari dan berkelanjutan;	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan, serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketahanan Air dan Pangan Kuat, serta Resiliensi Kuat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketahanan Air dan Pangan Kuat, serta Resiliensi Kuat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Secara Berkelanjutan
6	Mewujudkan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Berkualitas secara Berkelanjutan



Arah Kebijakan Transformasi



Misi 1:
Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Penguatan upaya penurunan stunting 3. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis 4. Penguatan kebijakan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya 5. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi 6. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan 7. Penguatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 8. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Percepatan upaya penurunan stunting 3. Percepatan pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis 4. Percepatan kebijakan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya 5. Percepatan pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi 6. Percepatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan 7. Percepatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 8. Percepatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Pengembangan upaya penurunan stunting 3. Perluasan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis 4. Perluasan kebijakan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya 5. Perluasan pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi 6. Perluasan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan 7. Perluasan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 8. Pengembangan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Pemantapan upaya penurunan stunting 3. Pemantapan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis 4. Pemantapan kebijakan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya 5. Pemantapan pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi 6. Pemantapan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan 7. Pemantapan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 8. Pemantapan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
--	---	---	---	---



Arah Kebijakan Transformasi

Periode 1 (2025 – 2029)

Periode 2 (2030-2034)

Periode 3 (2035 – 2039)

Periode 4 (2040 – 2045)

Membangun fondasi dan struktur transformasi pembangunan

Memperkuat fondasi dan struktur transformasi pembangunan

Ekspansi Nasional dan Daerah

Perwujudan Sarolangun Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Misi 2:
Mewujudkan perekonomian yang kuat berbasis keunggulan daerah melalui pemertaan ekonomi yang berkeadilan

1. Penguatan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya), (industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang)
2. Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
3. Peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif
4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis:
5. Penguatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerja sama Dunia Usaha Dunia Industri
6. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui integrasi ragam destinasi wisata
7. Pengembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat aglomerasi
8. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);
9. Penguatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
10. Penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)

1. Percepatan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya), (industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang)
2. Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
3. Percepatan peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif
4. Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis:
5. Percepatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerja sama Dunia Usaha Dunia Industri
6. Percepatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Upaya melalui integrasi ragam destinasi wisata
7. Percepatan kawasan perkotaan dan pusat-pusat aglomerasi
8. Percepatan pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);
9. Percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
10. Percepatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya), (industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang)
2. Perluasan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
3. Perluasan peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif
4. Pengembangan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis:
5. Pengembangan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerja sama Dunia Usaha Dunia Industri
6. Perluasan upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui integrasi ragam destinasi wisata
7. Perluasan kawasan perkotaan dan pusat-pusat aglomerasi
8. Perluasan pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);
9. Perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
10. Perluasan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)

1. Pemantapan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya), (industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang)
2. Pemantapan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
3. Pemantapan peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif
4. Pemantapan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis:
5. Pemantapan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerja sama Dunia Usaha Dunia Industri
6. Pemantapan upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui integrasi ragam destinasi wisata
7. Pemantapan kawasan perkotaan dan pusat-pusat aglomerasi
8. Pemantapan pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);
9. Pemantapan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
10. Penuntasan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)



Arah Kebijakan Transformasi



Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Pelayanan Publik yang Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimasi regulasi termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah 3. Penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi pendidikan anti korupsi: transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa: serta transparansi layanan perizinan berbasis digital: 4. Penguatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 5. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik 6. pelayanan publik masyarakat: 7. Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan optimasi regulasi termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2. Percepatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah 3. Percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi pendidikan anti korupsi: transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa: serta transparansi layanan perizinan berbasis digital: 4. Percepatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 5. Percepatan pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik 6. pelayanan publik masyarakat: 7. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan regulasi termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2. Perluasan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah 3. Perluasan pencegahan dan pemberantasan korupsi pendidikan anti korupsi: transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa: serta transparansi layanan perizinan berbasis digital: 4. Pengembangan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 5. Perluasan pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik 6. pelayanan publik masyarakat: 7. Perluasan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan regulasi termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 2. Pemantapan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah 3. Pemantapan pencegahan dan pemberantasan korupsi pendidikan anti korupsi: transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa: serta transparansi layanan perizinan berbasis digital: 4. Pemantapan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 5. Pemantapan pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik 6. pelayanan publik masyarakat: 7. Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
---	--	---	---	--



Arah Kebijakan Transformasi



<p>Misi 4: Mewujudkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kemajemukan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal 2. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 3. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal 2. Percepatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama; 3. Percepatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal 2. Perluasan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama; 3. Perluasan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal 2. Pemantapan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama; 3. Pemantapan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
--	---	---	---	---



Arah Kebijakan Transformasi



Misi 5:
Mewujudkan Lingkungan Hidup lestari dan berkelanjutan;

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah SAD 2. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung 3. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi 4. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah SAD 2. Percepatan upaya pelestarian hutan lindung 3. Percepatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi 4. Percepatan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah SAD 2. Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung 3. Perluasan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi 4. Perluasan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah SAD 2. Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung 3. Pemantapan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi 4. Pemantapan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
---	---	--	---



Arah Kebijakan Transfoamsi

Periode 1 (2025 – 2029)

Periode 2 (2030-2034)

Periode 3 (2035 – 2039)

Periode 4 (2040 – 2045)

Membangun fondasi dan struktur transformasi pembangunan

Memperkuat fondasi dan struktur transformasi pembangunan

Ekspansi Nasional dan Daerah

Perwujudan Sarolangun Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Misi 6:
Mewujudkan Infrastruktur dasar yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan

1. Penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah
2. Penguatan modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi
3. Penguatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah
4. Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
5. Penguatan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah

1. Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah:
2. Percepatan modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
3. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah:
4. Percepatan eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
5. Percepatan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah

1. Perluasan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah:
2. Perluasan modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
3. Perluasan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah:
4. Perluasan eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
5. Perluasan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah

1. Pemantapan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah:
2. Pemantapan modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
3. Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah:
4. Pemantapan eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
5. Pemantapan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		
1. Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;	1. Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup		
		Kesehatan ibu dan anak:		
		a. Angka Kematian Ibu (per 1.000 kelahiran hidup)		
		b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
		Penanganan tuberkulosis:		
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis		
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	
			2. Pendidikan berkualitas yang merata	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
				i) Literasi membaca
				ii) Numerasi
				Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
				Harapan lama sekolah (tahun)
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi				
3. Perlindungan sosial yang adaptif	3. Perlindungan sosial yang adaptif	Persentase jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (%)		
		Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (%)		
		Tingkat kemiskinan		
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
2. Terwujudnya perekonomian Kabupaten Sarolangun yang kuat berbasis keunggulan daerah;	4. IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Pengembangan pariwisata:
		a. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)
		b. Jumlah okupansi
		c. Jumlah kunjungan wisata
		Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)
		b. Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)
c. Rasio kewirausahaan daerah (%)		
d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		
		Tingkat pengangguran terbuka
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
		Indeks Inovasi Daerah
	5. Penerapan ekonomi hijau	Indeks ekonomi hijau
	6. Transformasi digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	7. Integrasi ekonomi domestik dan global	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)
	8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
		Persentase desa mandiri



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
3. Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Pelayanan Publik yang Prima.	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas Efektif dan Efisien	Indeks SPBE
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Persepsi Korupsi
		Indeks Reformasi Hukum
4. Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang tentram dan tertib dalam kemajemukan;	10. Penguatan kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi lokal	Angka konflik sosial
		Angka konflik politik
5. Terwujudnya Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah	11. Stabilitas ekonomi daerah yang terjaga	Rasio pajak daerah terhadap PDRB
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
		Retribusi Daerah Terhadap PAD
		Tingkat inflasi



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
	12. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju	Persentase kerjasama dalam dan luar negeri yang berkinerja
		Indeks Pembangunan Kebudayaan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
		Indeks Ketimpangan Gender
6. Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang memiliki Lingkungan Hidup lestari dan berkelanjutan;	13. Lingkungan hidup berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
		Pengelolaan sampah:
		a. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
		b. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% Rumah Tangga)



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
	14. Berketahanan energi, air dan pangan	Konsumsi Listrik per kapita
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
		Ketahanan air:
		a. Kapasitas air baku (M^3 /detik)
	b. Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan (%)	
	15. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana
		Persentase penurunan emisi GRK
		a. Kumulatif
		b. Tahunan
7. Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang memiliki Infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas	16. Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan berkurang	Rasio Gini
		Indeks Wiliamson
	17. Daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah



Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang memiliki Infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas	16. Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan berkurang	Rasio Gini
		Indeks Wiliamson
	17. Daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah



TERIMA KASIH